

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Komponen Input**

- a. Kebijakan FDS sudah ada yaitu berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH, dan SK pendamping. Kebijakan dari daerah baru berupa Surat Keputusan Walikota Padang tentang tim pelaksana PKH. Kebijakan ini belum maksimal disosialisasikan.
- b. SDM sudah mencukupi, namun jumlah dampingan perpendamping tidak merata.
- c. Dana belum mencukupi dan belum dialokasikan untuk pelaksanaan FDS, tetapi terdapat dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial setiap tahunnya yang berasal dari dana APBN.
- d. Sarana masih kurang memadai, seperti kurangnya media pendukung berupa laptop, speaker, poster, kartu gizi, kartu bermain bagi setiap pendamping dan buku pintar bagi semua KPM PKH.

##### **2. Komponen Proses**

- a. Perencanaan sudah baik, perencanaan berupa waktu, tempat, pelaksanaan, kelompok sasaran, materi yang akan disampaikan, ketersediaan sarana dan prasarana.
- b. Pelaksanaan FDS tentang gizi sudah dilaksanakan oleh pendamping di wilayah dampungannya namun masih belum berjalan sesuai pedoman.
- c. Pencatatan dan pelaporan masih belum dilakukan setiap bulannya.
- d. Monitoring belum dilakukan maksimal, hanya berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat saja. Terkait kunjungan lapangan baru beberapa pendamping yang dikunjungi kelapangan. Terkait Evaluasi sudah rutin dilakukan, namun belum ada membahas terkait masalah FDS gizi.

### 3. Komponen Output

FDS tentang Gizi di wilayah Kecamatan Koto Tangahbelum terlaksana secara maksimal dan belum sesuai dengan podoman karena masih ada beberapa kendala, diantaranya belum adanya kebijakan khusus FDS dari pemerintah Kota Padang, masih ada pendamping yang tidak melaksanakan proses sesuai alur, kurangnya sarana, pelaporan belum dilakukan setiap bulan. Selain itu, belum ada indikator pencapaian FDS tentang gizi secara spesifik.

### B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

#### 1. Pemerintah Daerah

- a. Perlunya penguatan dari daerah berupa kebijakan khusus terkait pelaksanaan FDS tentang Gizi dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) serta melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, karena FDS pada PKH juga merupakan salah satu program lintas sektor dalam upaya penanggulangan masalah Gizi di Indonesia.

#### 2. Bagi Dinas Sosial Kota Padang

- a. Mensosialisasikan kembali kebijakan terkait FDS tentang gizipada sektor terkait mulai dari Tingkat Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan, serta Faskes.
- b. Mengajukan perencanaan anggaran kepada Pemerintah daerah Kota Padang melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agardana dampingan (*sharing*) APBD dan diprioritaskansalah satunya untuk menunjang pelaksanaan FDS tentang gizi.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurangseperti laptop, speaker, infocus, poster, kartu gizi, kartu bermain bagi semua pendamping dan buku pintar bagi seluruh KPM PKH.
- d. Melakukan pelatihan penyegaran ulang untuk materi FDS tentang gizi kepada pendamping PKH agar informasi yang disampaikan update.

- e. Memberikan sanksi tegas bagi pendamping yang tidak mengirimkan laporan setiap bulannya seperti teguran lisan hingga sanksi SP.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan aturan yang ada baik dari laporan, pengaduan, maupun dilapangan.

### **3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang**

- a. Meningkatkan koordinasi dengan mengarahkan bidan atau kader-kader posyandu untuk membantu pendamping memantau perubahan perilaku KPM yang mempunyai balita dalam melakukan kunjungan posyandu serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balitanya.

### **4. Bagi Pendamping PKH**

- a. Diharapkan pendamping PKH untuk melakukan kegiatan FDS tentang gizi ini setiap bulannya sesuai dengan pedoman dan *mereview* kembali materi pada setiap sesi yang disampaikan pada pertemuan selanjutnya.
- b. Diharapkan pendamping PKH membuat buku kontrol pertumbuhan dan perkembangan balita bagi KPM yang tidak memiliki buku KIA sehingga dapat dipantau pada saat pertemuan kelompok.
- c. Diharapkan pendamping PKH untuk meningkatkan koordinasi dengan Tenaga Kesehatan di Puskesmas terkait keterlibatan petugas kesehatan dalam membantu pelaksanaan FDS Gizi di lapangan.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama mengenai pelaksanaan FDS tentang Gizi dapat melakukan penelitian dengan memperdalam dan terperinci dalam hal kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh FDS tentang gizi dalam mengubah perilaku ibu-ibu KPM PKH yang mempunyai balita serta dampak terhadap status gizi balita.